

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Indonesia adalah negara yang sangat besar. Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, hingga Sumber Daya Alamnya. Dilihat dari jumlah penduduknya, penduduk Indonesia merupakan yang keempat terbesar di dunia, setelah China, India, dan Amerika.²

Sedangkan Taiwan sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari China ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur China yang beribu kotakan di Taipei. Secara resmi memang banyak negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu negara yang berdaulat karena China sendiri selalu melaksanakan *One China Policy* kepada negara-negara lain di dunia. Republik Rakyat China masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara sendiri yang beraliran kumintang atau nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan China.

Belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara oleh sebagian besar negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan, PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) sebagai suatu organisasi internasional yang menaungi seluruh negara, tidak mengakui

¹ *Pengetahuan Tentang Negara Indonesia*: <http://www.negeripesona.com/2013/03/pengetahuan-tentang-negara-indonesia.html>.

² *Indonesia Adalah Negara Yang Sangat Kaya*: <http://www.mpr.go.id/posts/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya>. Minggu, 14 Juni 2015.

Taiwan sebagai anggotanya. Hal ini membuat banyak negara di berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan, perekonomian, dan ketenagakerjaan dengan Taiwan termasuk Indonesia.³

Taiwan dan RRC (Republik Rakyat China) mengakui prinsip *One China* dengan interpretasi masing-masing. Selama ini, Taiwan sulit diterima masyarakat internasional. Dengan adanya pengakuan *One China*, Taiwan berharap itu dapat menjadi modal yang cukup bagi pemerintah Indonesia untuk mau menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.⁴

Adanya prinsip Satu China, membuat posisi Taiwan di mata internasional tersisih dan negara-negara lain melaksanakan *One China Policy*. Usaha China dalam mengkampanyekan *One China Policy* telah berlangsung melalui diplomasi panjang, baik secara bilateral maupun multilateral sejak deklarasi RRC (Republik Rakyat China) 1949. Perseteruan utama antara pemerintahan di Beijing dan Taipei adalah keduanya menyepakati adanya Satu China namun berbeda dalam mengakui pemilik legitimasi pemerintahannya.⁵

Hubungan negara Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan yang terbilang unik. Keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik, karena Indonesia menganut Kebijakan Satu China (*One China Policy*), tetapi kerjasama Indonesia - Taiwan berjalan relatif baik, bahkan menunjukkan banyak kemajuan. Kini Indonesia - Taiwan telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, dan tenaga kerja hingga

³ Sutopo, FX. 2000. *Sejarah Singkat China*. Jakarta: Gramedia.

⁴ Ade M. *Taiwan Berharap Hubungan dengan Indonesia Ditingkatkan*: <http://www.rmol.co>. Rabu, 11 November 2015.

⁵ *Menelisik Kedaulatan Taiwan*: <http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/>.

pendidikan.Indonesia sendiri telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun 1960.

Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy* atau kebijakan Satu China. Artinya, secara *de jure* Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dari China. Namun bukan berarti antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerjasama. Hubungan antara Indonesia dengan Taiwan hanya sebatas hubungan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin tetap menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah RRC (Republik Rakyat China) baik hubungan diplomatik maupun hubungan kerjasama ekonomi.

Taiwan merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup diperhitungkan. Banyak sekali hubungan kerjasama perdagangan yang telah dijalin dengan Taiwan diberbagai bidang. Mulai dari bidang perdagangan dan perekonomian, investasi-investasi perusahaan Taiwan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kepariwisataan. Kesemua aspek tersebut sangat menguntungkan baik bagi Indonesia maupun bagi Taiwan.⁶

Puncak kerjasama yang paling menguntungkan adalah tahun 80an. Hubungan kerjasama perekonomian diantara Indonesia dan Taiwan sangat tidak terganggu dengan adanya kebijakan luar negeri Satu China yang dianut oleh Indonesia. Indonesia masih menjadikan Taiwan sebagai negara partner kerjasama yang sangat baik. Kerjasama tersebut diantaranya adalah kerjasama dalam bidang perekonomian seperti penanaman investasi perusahaan-perusahaan Taiwan di Indonesia, kerjasama perdagangan seperti masuknya

⁶ Aat, SS. *Hubungan RI - Taiwan Tak Terkendala Masalah Politik*: <http://www.antaraneews.com>. Kamis, 01 April 2010.

barang-barang elektronik unggulan dalam bidang teknologi informasi seperti handpone dan laptop, kerjasama bidang ketenagakerjaan seperti banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Taiwan dalam segala bidang, bidang pendidikan dan juga bidang kepariwisataan.

Sampai sejauh ini sudah banyak investor Taiwan yang menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Taiwan adalah salah satu investor besar dari Asia di Indonesia. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tidak melihat adanya kendala berarti dalam kerjasama dengan Taiwan. Dalam berbagai pertemuan dengan pihak Taiwan, pihak Indonesia fokus menawarkan tiga sektor untuk dikembangkan, yakni infrastruktur, agribisnis, dan energi, namun sektor-sektor lainnya yang kebetulan mendapatkan insentif dari pemerintah tetap ditawarkan kepada pihak Taiwan.⁷

Meski tidak menjalin hubungan diplomatik lantaran berpedoman pada 'Kebijakan Satu China' (*One China Policy*), namun pemerintah Indonesia tidak menyurutkan kerja sama diplomatik walau dengan wujud lain. Hal ini dibuktikan dengan eratnya hubungan selama 45 tahun, atau sejak berdirinya kantor perwakilan kedua negara di Jakarta dan Taipei pada 1971.

Pada 1989, *Chinese Chamber of Commerce*, berganti nama menjadi *Taipei Economic and Trade Office*, Indonesia (TETO / Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan untuk Indonesia), hingga sekarang. TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) berfungsi mirip kedutaan besar yang menghubungkan kepentingan kedua negara atau setara kedutaan besar

⁷ Ibid.

negara sahabat. Di akhir 2015, TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) juga membuka kantor perwakilannya di Surabaya, Jawa Timur.⁸

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Taiwan meningkat dengan pesat. Menurut Direktur Divisi Informasi Media *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) di Indonesia, Tommy Lee, mengatakan Taiwan ingin berinvestasi lebih di Indonesia, khususnya dalam bidang manufaktur dan tekstil.

Namun demikian, perdagangan Indonesia dan Taiwan mengalami kesulitan karena tidak adanya hubungan diplomatik diantara keduanya. Saat ini, kedua negara memiliki hubungan setengah resmi karena hubungan diplomatik resmi hanya pada *One China Policy*. Meski begitu, Indonesia dan Taiwan masih dapat melanjutkan kerjasama yang dapat menghasilkan kontribusi positif untuk keduanya.

Hubungan non-diplomatik Indonesia dan Taiwan telah berkembang, terutama pada perdagangan, pariwisata pertanian, dan ekonomi. Termasuk investasi manufaktur dan tekstil.

Pada tahun 2010, Taiwan adalah 10 terbesar mitra dagang Indonesia, sementara Indonesia adalah 11 mitra dagang terbesar Taiwan. Pada 2010, Taiwan merupakan investor ke-8 terbesar asing di Indonesia dengan investasi akumulatif sebesar US 14 miliar Dolar, terutama berfokus pada pertanian, tekstil dan layanan alas kaki, furnitur, kehutanan dan perdagangan.⁹

⁸ Lazuardhi U. & Dinia A. *Taiwan Ingin Lebih Erat dengan Indonesia*: <http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/841448-taiwan-ingin-lebih-erat-dengan-indonesia>. Senin, 31 Oktober 2016.

⁹ http://www.republika.co.id/amp_version/m3va1i.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan. Sehingga penulis menetapkan pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah penelitian, yaitu:

- Mengapa Indonesia melakukan hubungan dagang dengan Taiwan di tengah kebijakan Satu China?

C. KERANGKA TEORI

Teori merupakan alat penjelasan yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diprediksi akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi. Selain itu juga digunakan konsep untuk mengorganisasikan dan mengidentifikasi fenomena yang menari perhatian. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut sistematis secara logis.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menjelaskan pokok permasalahan dengan menggunakan salah satu model yang dapat menjelaskan Politik Luar Negeri yaitu Model Aktor Rasional untuk mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

Model Aktor Rasional

Graham T. Allison mengajukan tiga model yang dapat menjelaskan proses pembuatan politik luar negeri, yaitu model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik. Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penulis akan

¹⁰ Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, hlm. 185.

menggunakan salah satu model, yaitu Model Aktor Rasional. Model ini mendeskripsikan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah hasil yang terjadi akibat dari tindakan-tindakan yang diciptakan oleh aktor rasional.¹¹

Tindakan atau kebijakan suatu negara dalam area internasional diciptakan oleh pemerintah dengan menggunakan strategi politik luar negeri.¹² Politik luar negeri di rancang suatu negara yang berupa sebuah kebijakan untuk di tujukan kepada negara lain dalam mencapai tujuan suatu negara. Politik luar negeri juga merupakan reaksi sebuah negara dalam menanggapi tindakan negara lain.¹³ Politik luar negeri dapat dipengaruhi dari faktor eksternal maupun faktor internal suatu negara. Dalam mencapai sebuah kepentingan nasional negara dapat melakukan beberapa macam kerjasama yang berupa kerjasama bilateral, multilateral, dan regional.¹⁴

Untuk dapat melaksanakan politik luar negeri, pembuat kebijakan harus menganalisa kepentingan nasional dan mengkalkulasikan keuntungan yang akan didapat negara. Ketika negara telah menetapkan kepentingan nasionalnya dan menyusunnya dalam sebuah daftar sesuai dengan prioritas, hasil kebijakan tersebut diterapkan dalam strategi politik luar negeri mereka dengan negara lain sehingga dapat menghasilkan keuntungan besar bagi negara.¹⁵

¹¹ Ibid.

¹² Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse. 2008. *International Relations. United State: Pearson International Edition.*

¹³ Jack C. Plano, Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional.*

¹⁴ Yanyan, Y. M. 2010. *Politik Luar Negeri.* Pustaka Unpad, 1-12.

¹⁵ Mohtar, M. 1994. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: LP3ES.

Konsep Konsensus

1992 Consensus (Konsensus 1992) adalah istilah politik mengacu pada hasil pertemuan pada tahun 1992 antara perwakilan semi resmi dari Republik Rakyat China (RRC) di daratan China dan *Republic of China* (ROC) di Taiwan. Kuomintang (KMT) dari ROC (Republik China) mengatakan bahwa adanya konsensus, sedangkan Partai Progresif Demokratik (DPP) dari *Republic of China* (ROC) dan Presiden ROC (*Republic of China*) pada tahun 1992, Lee Teng-hui, menyangkal keberadaan *consensus 1992*. Istilah 1992 Konsensus seperti yang dijelaskan oleh beberapa pengamat, yang artinya, hanya ada "*One China*", kedua pihak mengakui hanya ada "Satu China", baik China daratan dan Taiwan merupakan bagian dari China, namun kedua belah pihak setuju untuk menafsirkan makna "Satu China" menurut definisi mereka sendiri.

Dalam konsensus 1992, kedua belah pihak telah menunjukkan bahwa "kedua belah pihak mematuhi prinsip "Satu China" dan "berusaha untuk mencari reunifikasi nasional" sikap. Dalam kata lain, konsensus 1992 adalah untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak mematuhi prinsip "Satu China" sikap premis, untuk mengesampingkan "Satu China" implikasi politik dari perbedaan.¹⁶

Konsensus 1992 adalah hasil dari pertemuan November 1992 di British Hong Kong antara Asosiasi berbasis daratan China untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan (ARATS) dan Taiwan *Straits Exchange Foundation* (SEF). Tiga bulan sebelum pertemuan, pada tanggal 1 Agustus 1992 Taiwan menerbitkan pernyataan sehubungan penafsiran tentang makna "*One China*".

¹⁶ "1992 Consensus" *Keberanan Sejarah*: http://news.xinhuanet.com/tw/2006-04/05/content_4385932.htm. Rabu, 05 April 2006.

One China Policy atau “Kebijakan Satu China” mengacu pada sebuah formulasi kebijakan yang dipegang teguh oleh Republik Rakyat China dengan sentrum pemerintahan di Beijing yang menetapkan bahwa hanya ada satu China yang berdaulat dan memiliki aspek legalitas sebagai negara, yaitu Republik Rakyat China. Sedangkan eksistensi Republik China (Taiwan) dengan sentrum pemerintahan di Taipei diklaim sebagai bagian dari Republik Rakyat China. Pihak Beijing mendeklarasikan kepada forum internasional bahwa pihak Taiwan sudah selayaknya tunduk pada kebijakan Satu China ini, karena Taiwan telah terikat pada konsensus yang telah disepakati oleh perwakilan kedua belah pihak pada tahun 1992 di Hongkong.¹⁷

Pada tahun 1911, Taipei, menganggap “Satu China” yang berarti Republik China (ROC), dengan *de jure* kedaulatan atas seluruh China. Namun, saat ini ROC (*Republic of China*) memiliki yurisdiksi hanya atas Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu. Taiwan adalah bagian dari China, dan China daratan adalah bagian dari China juga.¹⁸

Konsensus 1992 adalah istilah politik mengacu pada hasil pertemuan pada tahun 1992 antara perwakilan semi resmi dari Republik Rakyat China (RRC) di daratan China dan *Republic of China* (ROC) di Taiwan.¹⁹ Kuomintang (KMT) dari ROC (Republik Taiwan) mengatakan bahwa konsensus ada, sedangkan Partai Progresif Demokratik (DPP) dari ROC (Republik Taiwan) dan Presiden ROC (*Republic of China*) pada tahun 1992, Lee

¹⁷ Michal Roberge dan Youkyung Lee. *China-Taiwan Relations, Council on Foreign Relations*: <http://www.cfr.org/publication.html>.

¹⁸ Shirley, A.Kan. *Evolution of the 'One China Policy*: <http://www.chinafile.com/library/reports/evolution-one-china-policy>. 12 Maret 2001.

¹⁹ *Chinese, U.S. Presidents Hold Telephone Talks On Taiwan, Tibet*: http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/27/content_7865209.htm. 27 Maret 2008.

Teng-hui, menyangkal keberadaan konsensus tahun 1992.²⁰ Seperti yang dijelaskan oleh beberapa pengamat, mengatakan bahwa prinsip "Satu China" kedua pihak mengakui hanya ada satu "China", baik China dan Taiwan merupakan bagian China.²¹ Namun kedua belah pihak setuju untuk menafsirkan makna "Satu China" menurut definisi mereka sendiri.²²

Dalam konsensus 1992, kedua belah pihak telah menunjukkan bahwa "kedua belah pihak mematuhi prinsip "Satu China" dan "berusaha untuk mencari reunifikasi nasional" sikap. Dalam kata lain, konsensus 1992 adalah untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak mematuhi prinsip "Satu China" sikap premis, untuk mengesampingkan "Satu China" implikasi politik dari perbedaan.²³

Sebagai hasil dari pertemuan 1992, ketua ARATS (Asosiasi berbasis daratan China untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan) Wang Daohan dan ketua SEF (*Straits Exchange Foundation*) Koo Chen-fu bertemu di Singapura pada tanggal 27 April 1993, yang dikenal sebagai "KTT Wang-Koo". Mereka menyimpulkan kesepakatan tentang otentikasi dokumen, transfer pos, dan jadwal untuk pertemuan ARATS (Asosiasi berbasis daratan China untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan) – SEF (*Straits Exchange Foundation*) masa depan. Pembicaraan tertunda karena ketegangan meningkat di Taiwan, tetapi pada Oktober 1998 putaran kedua KTT Wang-Koo diadakan di Shanghai. Wang dan Koo sepakat untuk bertemu lagi di Taiwan pada musim gugur tahun 1999, tapi pertemuan itu dibatalkan oleh pihak RRC (Republik Rakyat China) saat Presiden Lee Teng-hui mengusulkan "Teori Dua

²⁰ "1992 Consensus" (*In Chinese*), loc,cit.

²¹ Su. *The history of the: One China with varying definitions "Consensus" (in Chinese)*. National Policy Foundation. 04 April 2002.

²² Li Yafe. *Konsensus 92 Lintas Selat*. Chinatimes.com. Minggu, 11 September 2011.

²³ "1992 Consensus" (*In Chinese*), loc,cit.

Negara' dimana masing-masing pihak akan memperlakukan yang lain sebagai negara terpisah. Pejabat RRC (Republik Rakyat China) menunjukkan bahwa posisi ini tidak dapat diterima.

Pemerintah ROC (*Republic of China*) pimpinan KMT (Koumintang) telah menyatakan hasil pertemuan 1992 sebagai "Satu China dengan interpretasi yang berbeda". Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa ada Satu China, tetapi secara tidak langsung diakui dan dihormati bahwa kedua belah pihak memiliki interpretasi yang berbeda dari konsep itu. Sebaliknya, Partai Komunis China (CPC) yang dipimpin pemerintah RRC (Republik Rakyat China) secara konsisten menekankan bahwa pertemuan 1992 mencapai pemahaman bahwa ada "Satu China". Sedangkan partai oposisi utama ROC (Republik China), Partai Progresif Demokratik (DPP), tidak menilai pertemuan 1992 sebagai mencapai *consensus* menjadi hanya "Satu China". Sebaliknya, melihat hasil pertemuan menetapkan bahwa kedua belah pihak memiliki interpretasi yang berbeda dari *status quo*.²⁴

Oleh karena itu, pihak Beijing menganggap bahwa eksistensi kebijakan yang hanya mengakui adanya satu China ini merupakan *status quo* yang tidak dapat diganggu gugat. Taiwan terus mengupayakan negosiasi demi meraih kedaulatan penuh sebagai satu negara yang tidak identik dengan Republik Rakyat China.

Dalam praktiknya, Republik Rakyat China menetapkan satu regulasi mutlak dalam berinteraksi dengan dunia internasional, yaitu dengan menerapkan satu mekanisme absolut bahwa setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan RRC (Republik

²⁴ The Congressional Research Paper source notes that it was also printed in a book by a KMT politician: Su Chi, *The Historical Record of the Consensus of "One China, Different Interpretations"* (Taipei: National Policy Foundation, 2002); Also in "Strait Group Agrees to State Positions 'Orally'," Central News Agency, Taipei, November 18, 1992.

Rakyat China) wajib menghindari hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dengan alasan bahwa Taiwan telah terdaftar dalam zona yang berada dalam teritori kedaulatan China.

D. HIPOTESA

Dari penjelasan konsep dan teori diatas, Penulis memberikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang di kemukakan di atas, yaitu: Alasan Indonesia melakukan hubungan perdagangan dengan Taiwan di tengah kebijakan Satu China.

Pertama : Secara ekonomi, Indonesia mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Taiwan.

Kedua : Secara politik, kebijakan Satu China yang diadopsi Indonesia memberikan peluang kerjasama dengan Taiwan karena Indonesia tetap menempatkan Taiwan sebagai entitas ekonomi dibanding sebagai entitas politik.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai strategi politik luar negeri Taiwan yang menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di bidang perekonomian di bawah kebijakan Satu China.
2. Serta memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pihak.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian agar lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis telah membatasi kajian pada persoalan alasan Indonesia melakukan hubungan perdagangan dengan Taiwan di tengah Kebijakan Satu China dimana pada tahun 2010 terdapat beberapa konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Taiwan, hingga di tahun 2016 terjadi kenaikan nilai investasi Taiwan terhadap Indonesia yang signifikan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif (deskriptif), yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi berbagai literatur yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan, maka tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab. Secara ringkas, sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II: SEJARAH DAN PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Dalam bab ini, berisi tentang sejarah dan pasang surut hubungan Indonesia – Taiwan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab yang pertama akan membahas tentang sejarah hubungan Indonesia – Taiwan. Kemudian pada sub-bab kedua akan membahas tentang pasang surut hubungan Indonesia – Taiwan.

BAB III: ONE CHINA POLICY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang sejarah *One China Policy* dan implikasinya terhadap hubungan Indonesia – Taiwan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama tentang *One China Policy*, awal mula adanya kebijakan Satu China. Sub-bab kedua tentang implikasi adanya OCP (*One China Policy*) terhadap hubungan Indonesia – Taiwan.

BAB IV: ALASAN EKONOMI INDONESIA DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN DAGANG DENGAN TAIWAN DI TENGAH KEBIJAKAN SATU CHINA

Peningkatan kerjasama merupakan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taiwan. Dalam kerjasama tersebut, Taiwan banyak melakukan investasi dan perdagangan dengan Indonesia, begitu pun sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Taiwan merupakan mitra penting bagi Indonesia. Terdapat alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia menjadikan Taiwan sebagai mitra pentingnya. Salah satu alasannya adalah Taiwan termasuk dari salah satunya Macan Asia. Melalui Taiwan yang memiliki peran penting dalam kawasan perekonomian Asia, Indonesia memanfaatkan hal tersebut melalui menarik perhatian investor asing Taiwan untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya.